

**ANALISIS PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP),  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN PENGAWASAN KEUANGAN  
DAERAH TERHADAP NILAI INFORMASI LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH KOTA BITUNG**

*Kalcum Patiro<sup>1</sup>, Tri oldy Rotinsulu<sup>2</sup>, George M.V. Kawung<sup>3</sup>*

*Fakultas Ekonomi dan Binis, Magister Ilmu Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Sam Ratulangi, Manado*

**ABSTRAK**

Berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bitung pada Tahun Anggaran 2011 sampai 2017 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian. Penulis ingin mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Bitung. Untuk itu penulis melakukan analisis apakah Nilai informasi laporan keuangan dipengaruhi oleh faktor-faktor : Sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah.

Penelitian ini dilakukan dengan cara memberikan kuesioner sebanyak 120 kuesioner, yang dibagikan kepada responden yang merupakan Kepala dan staf Bagian Keuangan pada Perangkat Daerah di Kota Bitung. Data diolah dengan menggunakan SPSS 16.

Setelah data dianalisis, ditemukan bahwa semua faktor diatas berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan Pemerintah Kota Bitung. Artinya, jika sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah semakin baik maka nilai informasi dari laporan keuangan yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula.

**Kata Kunci** : nilai informasi, sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah.

**ABSTRACT**

*Based on the result of the Bitung city Government Financial Report Fiscal Year 2011 to 2017 received opinions Wajar Tanpa Pengecualian. The writer wanted to know the factors that influence the value of information on the financial statements of the Bitung city government.. For this reason, the writer analyses whether the information value of government financial is influenced by several factors : the system of intern control, information technology utilization and the control of regional finance.*

*This research was conducted by giving questionnaires as many as 120 questionnaires, which were distributed to respondents who were the Head and staff of PD's accounting departement in Bitung City. Data is processed using SPSS 16.*

*After the data were analyzed, it was found that all of the above factors had a significant positive effect on the value of the financial statements of the Bitung City Government. That is, if the government internal control system, the utilization of information technology and regional financial supervision is getting better, the value of information from the financial statements produced by the government will be better also.*

**Keywords** : information value, government internal control system, the utilization of information technology and regional financial supervision

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Reformasi di berbagai bidang yang sedang berlangsung di Indonesia telah membawa perubahan terhadap sistem politik, sosial, kemasyarakatan serta ekonomi sehingga menimbulkan tuntutan yang beragam terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik, serta dengan meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good government governance*), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2002).

Laporan Keuangan Daerah merupakan informasi yang memuat data berbagai elemen struktur kekayaan dan struktur finansial yang merupakan pencerminan hasil aktivitas tertentu. Istilah "*Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*" meliputi semua laporan dan berbagai penjelasannya yang mengakui laporannya tersebut akan diakui sebagai bagian dari laporan keuangan.

Akuntabilitas sektor publik berhubungan dengan praktik transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak publik. Sedangkan *good governance* menurut World Bank didefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, pencegahan korupsi baik secara politis maupun administratif, menciptakan disiplin anggaran, serta menciptakan kerangka hukum dan politik bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Mardiasmo, 2005).

Nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan (Suwardjono, 2005:165). Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat mendukung pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib memperhatikan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan untuk keperluan perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan.

Apabila informasi yang terdapat di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memenuhi kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah seperti yang disyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, berarti pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Untuk itu, diperlukan adanya Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mana akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi.

Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengendalian Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan nilai laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan.

BPK menghimbau agar temuan tentang Sistem Pengendalian Intern dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi perhatian bersama, sehingga dapat mencapai efisiensi, efektivitas, dan mencegah terjadinya kerugian keuangan negara demi kepentingan masyarakat dan daerah. Hal terakhir yang mungkin memiliki pengaruh terhadap keandalan dan ketepatanwaktuan pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah pengawasan keuangan daerah. Untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan, yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007). Berdasarkan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2011, yang dimaksud dengan pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengawasan merupakan upaya untuk mengenali penyimpangan atau hambatan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Bila ternyata kemudian ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan, diharapkan akan dapat segera dideteksi atau diambil tindakan koreksi, sehingga informasi keuangan dapat segera digunakan oleh pemakai, dan pengelolaan keuangan pemerintah daerah dapat berjalan secara maksimal. Dari hasil penelitian Galuh (2012) ditemukan masih lemahnya pengawasan dan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Untuk itu penulis memilih judul penelitian yaitu “Analisis Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bitung”.

### **Rumusan Masalah**

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Sistem Pengendalian Intern (SPIP) berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bitung?
2. Apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bitung?
3. Apakah Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bitung?
4. Apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bitung?

### **Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis apakah Sistem Pengendalian Intern (SPIP) berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bitung.
2. Untuk menganalisis apakah Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bitung.
3. Untuk menganalisis apakah Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bitung.
4. Untuk menganalisis apakah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah berpengaruh secara simultan terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bitung.

### **Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berharga mengenai laporan keuangan Pemerintah Kota Bitung dan diharapkan dapat memberikan sumbangan konseptual berupa dalil atau prinsip-prinsip dalam penyusunan laporan keuangan.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

- a) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Kota Bitung untuk mengambil kebijakan/ keputusan mengenai pelaksanaan penyusunan laporan keuangan
- b) Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pemerintah Kota Bitung dalam memberikan informasi dalam penyusunan laporan keuangan.
- c) Bagi Inspektorat, sebagai bahan masukan dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah khususnya peranan Inspektorat dalam pengawasan keuangan daerah.
- d) Bagi akademisi, memberikan kontribusi pengembangan literatur akuntansi sektor publik di Indonesia terutama sistem pengendalian manajemen di sektor publik.

Hasil penelitian ini juga diharapkan akan dapat memberikan sumbangan bagi penelitian berikutnya.

### **Kerangka Pemikiran Teoritis**

#### **Landasan Teoritis**

Landasan Teori menjabarkan teori-teori relevan yang mendukung penelitian. Teori teori tersebut inilah yang akan mendukung kerangka pemikiran untuk perumusan hipotesis dan menganalisis hasil penelitian.

- **Teori Keagenan (Agency Theory)**

Teori keagenan (*Agency theory*) merupakan basis teori yang mendasari praktik bisnis perusahaan yang dipakai selama ini. Teori tersebut berakar dari sinergi teori ekonomi, teori keputusan, sosiologi, dan teori organisasi.

- **Teori Stakeholder**

Teori *stakeholder* mengungkapkan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya untuk kepentingan sendiri namun harus dapat memberikan manfaat bagi *stakeholdernya*.

- **Transparansi (*transparency*)**

Transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

- **Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.**

Pengendalian intern menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Dalam PP No 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

- **Pengawasan Keuangan Daerah**

pengawasan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga berdasarkan ruang lingkupnya Fatchurrochman (2002) pengawasan keuangan negara dapat dibedakan menjadi Pengawasan Internal dan Pengawasan eksternal.

- **Teknologi Informasi**

Teknologi informasi meliputi komputer (*mainframe, mini, micro*), perangkat lunak (*software*), *database*, jaringan (*internet, intranet*), *electronic commerce*, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson *et al.*, 2000).

• **Penggunaan Informasi Keuangan**

Pembuatan laporan keuangan daerah bertujuan untuk memberi informasi keuangan yang berguna untuk pembuatan keputusan ekonomi, sosial, politik dan juga laporan akuntabilitas itu sendiri. Selain tujuan tersebut, tujuan yang lebih penting dalam pelaporan itu adalah kepuasan pengguna informasi (Sujana, 2002).

• **Nilai Informasi**

Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan pemerintah dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut. Mengatakan bahwa informasi harus bermanfaat bagi para pemakai sama saja dengan mengatakan bahwa informasi harus mempunyai nilai (Suwardjono, 2005). Beberapa definisi dan rumusan kualitas informasi disajikan dalam tabel 1:

**Tabel 1 Definisi dan Rumusan Kualitas Informasi**

FASB (Suwardjono, 2005)	Wilkinson <i>et.al.</i> , (2000)	PP No. 24 Tahun 2005
<p><b>Kriteria kebermanfaatn/kualitas informasi:</b></p> <p>1. Kualitas primer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keberpautan/relevansi</li> <li>✓ Nilai balikan</li> <li>✓ Nilai prediktif</li> <li>✓ Ketepatanwaktuan</li> <li>- Keterandalan/reliabilitas</li> <li>✓ Keterujian</li> <li>✓ Ketepatan penyimbolan</li> </ul> <p>2. Kualitas sekunder</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterbandingan</li> <li>- Konsistensi</li> <li>- Kenetralan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nilai Informasi = Manfaat – Kos</li> <li>• Informasi bernilai jika dapat mengurangi ketidakpastian pengguna ketika berada dalam situasi keputusan tertentu.</li> <li>• Definisi kualitatif sulit diterapkan, karenanya perlu mempertimbangkan pendekatan kuantitatif salah satunya <i>information economics approach</i>.</li> <li>• Nilai informasi dipengaruhi oleh kualitas informasi yang melekat pada informasi, yaitu: relevan, akurat, tepat waktu, ringkas, jelas, dapat dikuantifikasi, &amp; konsisten.</li> </ul>	<p>Karakteristik kualitatif didefinisikan sebagai ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.</p> <p>Ukuran-ukuran normatif tersebut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Relevan                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Feedback value</i></li> <li>b. <i>Predictive value</i></li> <li>c. Tepat waktu</li> <li>d. Lengkap</li> </ol> </li> <li>1. Andal                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyajian jujur</li> <li>b. Dapat diverifikasi</li> <li>c. Netralitas</li> </ol> </li> <li>2. Dapat dibandingkan</li> <li>3. Dapat dipahami</li> </ol>

**METODE PENELITIAN**

➤ **Teknik Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data akan dilakukan melalui survei kuesioner yang diantar dan diambil sendiri oleh peneliti terhadap bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada Organisasi Satuan Kerja (OPD). Perangkat Daerah ini meliputi Dinas, Badan, Kantor, dan Bagian.

➤ **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah bagian akuntansi/penatausahaan keuangan pada semua Perangkat Daerah yang ada di Kota Bitung.

(Sampel diambil dengan metoda secara *purposive sampling method*. *Purposive sampling method* digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti (Sekaran, 2003). Kriteria responden dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/tata usaha keuangan pada Perangkat Daerah.

Responden dalam penelitian ini adalah kepala Perangkat Daerah, Kepala Tata Usaha atau Sekretaris dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha/ Umum/ Keuangan dan Bendahara Pengeluaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bitung Nomor 10 Tahun 2008, Perangkat Daerah Kota Bitung, terdiri atas: Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Satpol PP, Dinas Daerah (14 Dinas), Lembaga Teknis Daerah (9 Badan) dan 4 kantor serta 1 buah RSUD.

Perincian Perangkat Daerah yang berada di Kota Bitung dan yang menangani bidang akuntansi/penatausahaan keuangan serta yang menjadi sampling/responden adalah sebagai berikut :

**Tabel 2. Daftar Perangkat Daerah di Kota Bitung**

No	Perangkat Daerah di Kota Bitung	Bagian Akuntansi/ Penatusahaan Keuangan	Responden Sample Yang Digunakan
1	Sekretariat Daerah	4	0
2	Sekretarit DPRD	4	0
3	Inspektorat	4	4
	<b>BADAN</b>		
1	Bapeda	4	2
2	BKDPP (Kepegawaian)	4	0
3	Badan Kesbangpol	4	4
4	BPPD	4	4
5	Badan PP dan PA	4	4
	<b>DINAS</b>		
1	Dinas Pendidikan	4	4
2	Dinas Kesehatan	4	0
3	Dinas PUPR	4	4
4	Dinas Koperasi & UKM	4	0
5	Dinas Sosial	4	0
6	DKPP (Pertanian)	4	4
7	Dinas Perikanan	4	0
8	Dinas Perhubungan	4	4
9	Dinas Kependudukan dan Capil	4	4
10	Dinas Pariwisata	4	4
11	Dinas Perdagangan	4	0
12	Dinas PP & KB	4	4
13	DPMPTSP	4	4
14	RSUD	4	4
15	Dinas Perpustakaan	4	0
16	Dinas Tenaga Kerja	4	4
17	Dinas Lingkungan Hidup	4	4
18	Satpol PP	4	4

<b>KANTOR/KECAMATAN</b>			
1	Kecamatan Ranowulu	2	0
2	Kecamatan Matuari	2	0
3	Kecamatan Girian	2	0
4	Kecamatan Madidir	2	0
5	Kecamatan Maesa	2	0
6	Kecamatan Aertembaga	2	0
7	Kecamatan Lembut	2	0
8	Kecamatan Lemsel	2	0
Jumlah		120	60

➤ **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

Masing-masing variabel diukur dengan model skala Likert lima poin, yaitu:

- (1) Tidak Pernah,
- (2) Jarang,
- (3) Kadang-Kadang,
- (4) Sering, dan
- (5) Selalu.

Responden diminta untuk menyatakan pendapatnya berdasarkan skala point terhadap pernyataan yang diajukan sesuai dengan kondisi mereka yang sesungguhnya.

**Tabel 3. Definisi Operasional Variabel**

Variabel	Definisi Operasional
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Bagian dari pengendalian intern yang meliputi rencana organisasi, prosedur dan catatan yang dirancang untuk menjaga keterandalan data laporan keuangan
Pemanfaatan Teknologi Informasi	Tingkat integritas teknologi informasi pada pelaksanaan tugas-tugas akuntansi
Pengawasan Keuangan Daerah	Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pengawasan dilakukan secara terus menerus dalam mengevaluasi kegiatan, pelaksanaan tugas, pencatatan, pendokumentasian, pengujian bukti dan pelaporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
Nilai Informasi Laporan Keuangan	Kemampuan informasi untuk memberikan keyakinan bahwa informasi tersebut benar dan valid

➤ **Uji Validitas dan Reliabilitas**

- Uji validitas menggunakan analisis product moment dari pearson. Hasil uji ini dikatakan valid apabila  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , sedangkan dikatakan tidak valid apabila  $r_{hitung} < r_{tabel}$  (Sugiyono, 2001).

- Uji reliabilitas dilakukan dengan cara menghitung nilai *cronbach alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Nilai *cut off* untuk menentukan reliabilitas suatu instrumen adalah nilai *cronbach alpha* lebih dari 0.60 (Ghozali, 2004).

### ➤ Metode Analisis Data

#### 1. Statistik Deskriptif

Sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji statistik umum yang berupa statistik deskriptif. Statistik deskriptif meliputi *mean*, *minimum*, *maximum* serta standar deviasi yang bertujuan mengetahui distribusi data yang menjadi sampel di dalam penelitian.

#### 2. Uji Normalitas Data

Uji normalitas data bertujuan untuk menguji apakah variabel dependen dan variabel independen mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan uji statistik *Kolmogorov-Smirnov*. Kriteria yang digunakan adalah membandingkan *p-value* yang diperoleh dengan taraf signifikansi yang telah ditetapkan yaitu 5%. Apabila *p-value* > nilai signifikansi, maka data berdistribusi normal.

#### 3. Uji Asumsi Klasik

- Uji Multikolinieritas  
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen yang lainnya sama dengan nol. Uji multikolinieritas dilakukan dengan melihat *tolerance value* dan *value-inflating factor* (VIF). Nilai yang umum dipakai adalah *tolerance value* 0,10 dan VIF lebih kecil dari 10. (Ghozali,2005)
- Uji Autokorelasi  
Ghozali (2005) menyatakan bahwa uji autokorelasi adalah sebuah pengujian yang bertujuan untuk menguji apakah di dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$ . Jika terjadi korelasi nama dinamakan *problem* autokorelasi. Autokorelasi terjadi karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya.  
Autokorelasi diuji dengan menggunakan Durbin-Watson. Kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut.
  - 1) Bila angka Durbin – Watson berada di bawah  $-2$ , berarti ada autokorelasi.
  - 2) Bila angka Durbin – Watson diantara  $-2$  sampai  $+2$ , berarti tidak ada autokorelasi.
  - 3) Bila angka Durbin – Watson di atas  $+2$ , berarti ada autokorelasi negatif.
- Uji Heteroskedastisitas  
Ghozali (2005) menyatakan bahwa uji heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak heteroskedastisitas. Heteroskedastisitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji Scatterplot. Ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik Scatterplot antara SDRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang diprediksi dan sumbu X adalah residual. Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan

telah terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang telah diuraikan tersebut diatas dan titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 maka tidak terjadi heteroskedastisitas

- Pengujian Hipotesis

Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh tiap variabel independen terhadap variabel dependen. Persamaan regresi untuk menguji hipotesis-hipotesis yang diajukan dinyatakan dengan model sebagai berikut:

$$NILK = a + b1SPIP + b2PTI + b3PKD + e.....(1)$$

Keterangan:

N : Nilai Informasi Laporan Keuangan

a : Konstanta

b1, b2, b3 : Koefisien regresi

PIA : Pengendalian Intern Akuntansi

PTI : Pemanfaatan Teknologi Infomasi

PKD : Pengawasan Keuangan Daerah

e : *error*

### HASIL DAN PEMBAHASAN

- **HASIL DAN ANALISIS**

- **Statistik Deskriptif**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP), pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan Pemerintah Kota Bitung. Sebelum melakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji statistik dekriptif untuk mengetahui distribusi data jawaban responden dalam penelitian ini. Berikut ini statistik deskriptif dari masing-masing variabel penelitian.

**Tabel 4 Descriptive Statistics**

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SPIP	60	17	35	26.00	5.702
PTI	60	24	40	31.90	4.747
Pengawasan	60	27	45	41.68	5.117
NILK	60	36	45	43.58	2.913
Valid N (listwise)	60				

Sumber : Hasil Pengolahan Data

Keterangan :

SPIP = Pengendalian intern pemerintah merupakan variabel X1

PTI = pemanfaatan teknologi informasi merupakan variabel X2

Pengawasan = pengawasan keuangan daerah merupakan variabel X3

NILK = nilai informasi laporan keuangan merupakan variabel Y

- Hasil pengujian statistik deksriptif menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian intern pemerintah memiliki nilai minimum sebesar 17 dengan nilai maksimum 35. Nilai rata-rata variabel sistem pengendalian intern sebesar 26.00 dengan standar deviasi sebesar 5.702.

- Hasil pengujian untuk variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai minimum sebesar 24 dengan nilai maksimum 40. Nilai rata-rata variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 31.90 dengan standar deviasi sebesar 4.747.
- Hasil pengujian untuk variabel pengawasan keuangan daerah memiliki nilai minimum sebesar 27 dengan nilai maksimum 45. Nilai rata-rata variabel pengawasan keuangan daerah sebesar 41.68 dengan standar deviasi sebesar 5.117.
- Hasil pengujian untuk variabel nilai informasi laporan keuangan memiliki nilai minimum sebesar 36 dengan nilai maksimum 45. Nilai rata-rata variabel nilai informasi laporan keuangan sebesar 43.58 dengan standar deviasi sebesar 2.913.

• Analisis Data

❖ Uji Kualitas Data

Uji Validitas Data

Pengujian validitas dilakukan untuk menguji apakah pertanyaan/ Pernyataan dalam kuesioner telah sesuai mengukur konsep yang dimaksud. Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan *Pearson Correlation* yaitu dengan cara menghitung korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan skor total. Jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan skor total mempunyai tingkat signifikansi < 0,05, maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid dan sebaliknya.

Berikut ini adalah hasil uji validitas atas pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), pengawasan keuangan daerah (X3), dan nilai informasi laporan keuangan (Y).

**Tabel 5 Uji validitas sistem pengendalian intern pemerintah**

Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Pertanyaan 1	0,805**	0,000	Valid
Pertanyaan 2	0,789**	0,000	Valid
Pertanyaan 3	0,916**	0,000	Valid
Pertanyaan 4	0,928**	0,000	Valid
Pertanyaan 5	0,946**	0,000	Valid
Pertanyaan 6	0,935**	0,000	Valid
Pertanyaan 7	0,758**	0,000	Valid

Sumber: Data hasil pengolahan SPSS

Tabel 5 menunjukkan bahwa semua item pernyataan untuk sistem pengendalian intern pemerintah memiliki kriteria valid dengan nilai signifikansi <0,05. Hal ini berarti semua item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini menganalisis adanya pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah yang diukur pada kuesioner tersebut.

Tabel 6 Uji validitas pemanfaatan teknologi informasi

Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Pertanyaan 1	0,962 <sup>**</sup>	0,000	Valid
Pertanyaan 2	0,956 <sup>**</sup>	0,000	Valid
Pertanyaan 3	0,566 <sup>**</sup>	0,000	Valid
Pertanyaan 4	0,958 <sup>**</sup>	0,000	Valid
Pertanyaan 5	0,938 <sup>**</sup>	0,000	Valid
Pertanyaan 6	0,818 <sup>**</sup>	0,000	Valid
Pertanyaan 7	0,962 <sup>**</sup>	0,000	Valid
Pertanyaan 8	0,683 <sup>**</sup>	0,006	Valid

Sumber: Data hasil pengolahan SPSS

Tabel 6 menunjukkan bahwa semua item pertanyaan untuk pemanfaatan teknologi informasi memiliki kriteria valid dengan nilai signifikansi  $<0,05$ . Hal ini berarti semua item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini mampu menganalisis adanya pengaruh pemanfaatan teknologi informasi yang diukur pada kuesioner tersebut.

Tabel 7 Uji validitas nilai informasi laporan keuangan

Pertanyaan	Pearson Correlation	Sig. (2-tailed)	Keterangan
Pernyataan 1	0,629 <sup>**</sup>	0,000	Valid
Pernyataan 2	0,877 <sup>**</sup>	0,000	Valid
Pernyataan 3	0,867 <sup>**</sup>	0,005	Valid
Pernyataan 4	0,962 <sup>**</sup>	0,000	Valid
Pernyataan 5	0,877 <sup>**</sup>	0,000	Valid
Pernyataan 6	0,909 <sup>**</sup>	0,000	Valid
Pernyataan 7	0,749 <sup>**</sup>	0,000	Valid
Pernyataan 8	0,954 <sup>**</sup>	0,00	Valid
Pernyataan 9	0,826 <sup>**</sup>	0,000	Valid

Sumber: Data hasil pengolahan SPSS

Tabel 7 menunjukkan bahwa semua item pertanyaan untuk nilai informasi laporan keuangan memiliki kriteria valid dengan nilai signifikansi  $<0,05$ . Hal ini berarti semua item pertanyaan yang digunakan dalam penelitian ini mampu menganalisis adanya pengaruh nilai informasi laporan keuangan yang diukur pada kuesioner tersebut.

### Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengujian ini dilakukan menggunakan teknik *Cronbach Alpha*. Suatu instrumen dapat dikatakan reliabel bila memiliki koefisien keandalan atau *Cronbach Alpha*  $\geq 0,60$ .

Tabel 8 Hasil Uji Realibilitas

No.	Variabel	Cronbach's Alpha	N of Items	Keterangan
1.	Sistem pengendalian intern	0,934	7	Reliable
2.	Pemanfaatan teknologi informasi	0,951	8	Reliable
3.	Pengawasan keuangan daerah	0,960	9	Reliable
4.	Nilai Informasi Laporan Keuangan	0,942	9	Reliable

Sumber: Data hasil pengolahan SPSS

Tabel 8 menunjukkan nilai Cronbach's Alpha untuk sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 0,934, pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,951, Pengawasan keuangan daerah sebesar 0,960, dan nilai informasi laporan keuangan 0,942. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semua pernyataan dalam kuesioner ini *reliable* karena memiliki nilai Cronbach's Alpha > 0,60.

**Uji Asumsi Klasik**

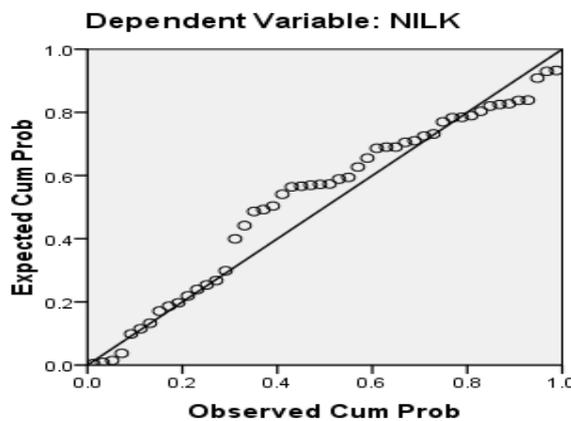
Sebelum melakukan pengujian hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik, pengujian ini dilakukan untuk mendeteksi terpenuhinya asumsi-asumsi dalam model regresi berganda dan untuk menginterpretasikan data agar lebih relevan dalam menganalisis.

**Uji Normalitas Data**

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data berdistribusi normal. Pengujian tentang normal tidaknya data dilakukan dengan norma P-Plot. Jika titik-titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik data searah mengikuti garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Gambar 1 Norma P-Plot

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Pada gambar 1 terlihat bahwa titik data menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebaran titik-titik data searah mengikuti garis diagonal. Jadi dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi dengan normal, sehingga model regresi memenuhi asumsi normalitas.

**Uji multikolinieritas**

Pengujian multikolinieritas dilakukan untuk melihat apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel independen. Cara mendeteksinya adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Jika nilai VIF < 10 dan *tolerance* >0,1 maka variabel independen terbebas dari persoalan multikolinieritas.

**Tabel 9. Hasil Uji Multikolinieritas**

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Sistem pengendalian intern	,993	1,007
Pengawasan keuangan daerah	,993	1,008
Pemanfaatan teknologi informasi	,986	1,014

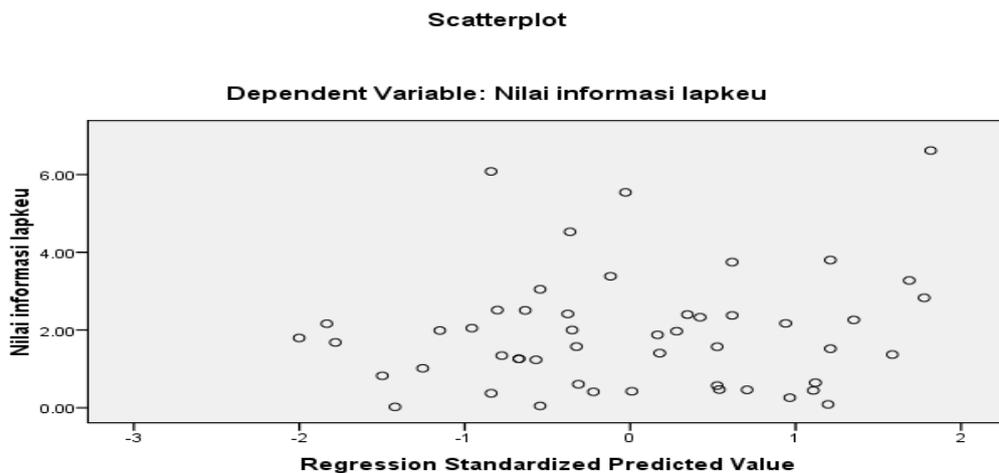
Sumber: Hasil olah data dengan SPSS

Tabel 9 menunjukkan bahwa semua nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel independen terbebas dari multikolinieritas

**Uji heteroskedastisitas**

Uji heterokedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas; sedangkan untuk varians yang berbeda disebut heterokedastisitas. Ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residual. Jika grafik plot menunjukkan suatu pola titik yang bergelombang atau melebar kemudian menyempit, maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi heteroskedastisitas. Namun jika tidak ada pola yang jelas, yaitu seret titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

**Gambar 2. Hasil Uji Heterokedastisitas**



Sumber: Hasil Olah data dengan SPSS

Gambar 2. menunjukkan bahwa pada scatterplot, titik-titik yang ada tidak membentuk sebuah pola namun menyebar, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian tidak terjadi heterokedastisitas.

❖ Hasil Analisis Regresi

Hasil pengujian asumsi klasik menunjukkan bahwa model regresi yang dipakai telah memenuhi asumsi klasik sehingga dapat dilanjutkan dengan analisis regresi berganda. Model regresi berganda dalam penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X3) dan pengawasan keuangan daerah (X2), terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Bitung (Y). Hasil analisis regresi berganda adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Regresi Berganda

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23.125	4.162		5.556	.000
	SPIP	.376	.056	.655	6.719	.000
	PTI	.154	.098	.151	2.572	.006
	Pengawasan	.180	.048	.256	3.732	.000

a. Dependent Variable: NILK

Sumber: Hasil Olah data dengan SPSS

Berdasarkan tabel 10, diperoleh persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = 23.125 + 0,376X_1 - 0,154X_2 + 0,180X_3 + e$$

Pengujian hipotesa secara simultan

Pengujian hipotesis secara simultan (uji F) dilakukan untuk menunjukkan apakah ada pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah , pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah yang digunakan dalam model regresi mempunyai pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap nilai informasi laporan keuangan. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 11

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	859.919	3	286.640	56.637	.000 <sup>a</sup>
	Residual	283.415	56	5.061		
	Total	1143.333	59			

a. Predictors: (Constant), Pengawasan, PTI, SPIP

b. Dependent Variable: NILK

Sumber: Hasil Olah data dengan SPSS

Nilai  $F_{hitung}$  diperoleh dari hasil pengolahan data menggunakan SPSS sedangkan untuk menentukan nilai  $F_{tabel}$ , maka dengan menggunakan tingkat keyakinan 95%,  $\alpha = 5\%$ , maka diperoleh:

$$df \text{ (degree of freedom) } 1 = \text{jumlah variabel independen} \\ = 3 \\ df \text{ (degree of freedom) } 2 = n - k - 1 \\ = 60 - 3 - 1 = 56$$

Berdasarkan tabel distribusi F, nilai  $F_{tabel} = 2,77$ .

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel IV.10, menunjukkan bahwa  $F_{hitung} = 56,637$ , sehingga  $F_{hitung} = 56,637 > F_{tabel} = 2,77$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak. Dilihat dari nilai signifikansi, tabel 11 menunjukkan bahwa nilai signifikansi adalah  $0,000 < 0,005$  sehingga  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Bitung.

**Pengujian hipotesa secara parsial**

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan melalui uji t untuk mengetahui besarnya pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah secara individual terhadap nilai informasi laporan keuangan. Hasil uji t ini pada output SPSS dapat dilihat pada tabel 12

**Tabel 12**  
**Coefficientsa**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	23.125	4.162		5.556	.000
Sistem Pengendalian Intern	.376	.056	.655	6.719	.000
Pemanfaatan Teknologi Informasi	.154	.098	.151	2.572	.006
Pengawasan Keuangan	.180	.048	.256	3.732	.000

a. Dependent Variable: NILK

Sumber: Hasil Olah data dengan SPSS

Uji t juga dilakukan dengan membandingkan nilai  $t_{hitung}$  dengan nilai  $t_{tabel}$ . Nilai  $t_{hitung}$  diperoleh dari hasil perhitungan SPSS sedangkan  $t_{tabel}$  diperoleh dari tabel distribusi t dicari pada  $\alpha = 5\% : 2 = 2,5\%$  (uji 2 sisi) dengan derajat kebebasan (df)  $n-k-1$  atau  $60-3-1 = 56$ . Dengan pengujian 2 sisi (signifikansi = 0,025) hasil diperoleh untuk  $t_{tabel}$  sebesar 2,00324, sehingga:

1. Jika  $t_{hitung} > 2,00324$  maka  $H_a$  diterima dan  $H_0$  ditolak.
2. Jika  $t_{hitung} < 2,00324$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.

Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah secara individual terhadap nilai informasi laporan keuangan, dapat juga dilakukan dengan membandingkan *p-value* pada kolom Sig. dengan tingkat signifikansi yang digunakan sebesar 0,05.

1. Jika *p-value* < 0,05 maka  $H_a$  diterima dan  $H_o$  ditolak
2. Jika *p-value* > 0,05 maka  $H_a$  ditolak dan  $H_o$  diterima

Penjelasan dari hasil uji parsial adalah sebagai berikut.

1. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Bitung

Dari tabel 4.10 dapat dilihat bahwa:

- a) Nilai  $t_{hitung}$  dari variabel sistem pengendalian intern pemerintah adalah 6,719, sehingga:

$$t_{hitung} = 6,719 > t_{tabel} = 2,00324$$

- b) Signifikansi dari variabel sistem pengendalian intern pemerintah adalah sebesar  $0,00 < 0,05$ .
- c) Hal ini menunjukkan bahwa  $H_{a1}$  diterima dan  $H_{o1}$  ditolak, sehingga terbukti bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Bitung.

2. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Bitung.

Dari tabel 4.10 dapat dilihat bahwa:

- a) Nilai  $t_{hitung}$  dari variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah 2,572, sehingga:

$$t_{hitung} = 2,572 > t_{tabel} = 2,00324$$

- b) Signifikansi dari variabel pemanfaatan teknologi informasi adalah sebesar  $0,006 < 0,05$ .
- c) Hal ini menunjukkan bahwa  $H_{a2}$  diterima dan  $H_{o2}$  ditolak, sehingga terbukti bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Bitung.

3. Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Bitung

Dari tabel 4.10 dapat dilihat bahwa:

- a) Nilai  $t_{hitung}$  dari pengawasan keuangan daerah adalah 3,732, sehingga:

$$t_{hitung} = 3,732 > t_{tabel} = 2,00324$$

- b) Signifikansi dari variabel pengawasan keuangan daerah adalah sebesar  $0,000 < 0,05$ .

Hal ini menunjukkan bahwa  $H_{a3}$  diterima dan  $H_{o3}$  ditolak, sehingga terbukti bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap Nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Bitung.

### Uji koefisien korelasi (R) dan koefisien determinasi (*adjusted R2*)

Uji koefisien korelasi digunakan untuk mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Bitung secara serentak. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar prosentase variasi sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah, yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Bitung. Tabel berikut ini merupakan hasil uji koefisien korelasi dan determinasi atas penelitian yang dilakukan.

**Tabel 13**  
**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.867 <sup>a</sup>	.752	.739	2.250

a. Predictors: (Constant), Pengawasan, PTI, SPIP

b. dependent Variable : Nilai Informasi Laporan Keuangan

Sumber: Hasil Olah data dengan SPSS

Nilai koefisien korelasi (R) berkisar antara 0 sampai 1, nilai semakin mendekati 1 berarti hubungan yang terjadi semakin kuat, sebaliknya nilai semakin mendekati 0 maka hubungan yang terjadi semakin lemah. Menurut Sugiyono (2014) pedoman untuk memberikan interpretasi koefisien korelasi sebagai berikut:

0,00	-	0,199	=	sangat rendah
0,20	-	0,399	=	rendah
0,40	-	0,599	=	sedang
0,60	-	0,799	=	kuat
0,80	-	1,000	=	sangat kuat

Berdasarkan tabel 13, koefisien korelasi (R) sebesar 0,739 menunjukkan bahwa hubungan (korelasi) antara variabel independen dengan variabel dependen merupakan hubungan yang sangat kuat. Artinya sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Bitung mempunyai hubungan yang sangat kuat, karena mendekati nilai 1.

Untuk regresi dengan lebih dari dua variabel bebas digunakan *adjusted R<sup>2</sup>* sebagai koefisien determinasi. Jika nilai *adjusted R<sup>2</sup>* sama dengan 0, maka variasi variabel independen yang digunakan dalam model tidak menjelaskan sedikitpun variasi variabel dependen. Sebaliknya *adjusted R<sup>2</sup>* sama dengan 1, maka variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen. Berdasarkan tabel 13, nilai *adjusted R<sup>2</sup>* adalah 0,739 yang artinya nilai informasi laporan keuangan sebesar 74% dipengaruhi oleh sistem pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah sedangkan sisanya 26% dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini.

#### ➤ Pembahasan

##### **Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Bitung**

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pada variabel sistem pengendalian intern pemerintah,  $t_{hitung} = 6,719 > t_{tabel} = 2,00324$  sehingga sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pada Pemerintah Kota Bitung. Nilai koefisien regresi sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 0,376 menunjukkan bahwa jika adanya pengendalian intern pemerintah maka nilai informasi laporan keuangan akan semakin baik.

Hasil penelitian ini sama dengan yang dilakukan Fadhillah (2013) tentang Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah yang menunjukkan bahwa pengendalian intern memberikan pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah.

### **Pengaruh Pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi laporan keuangan Pemerintah Kota Bitung.**

Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa pada variabel pemanfaatan teknologi informasi,  $t_{hitung} = 2,572 < t_{tabel} = 2,00324$  sehingga pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pada Pemerintah Kota Bitung. Nilai koefisien regresi pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0.154 menunjukkan bahwa penggunaan teknologi telah dilakukan secara optimal.

Selain keterandalan hasil operasi dan kemampuan untuk mengurangi *human error*, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengolahan data diketahui memiliki keunggulan dari sisi kecepatan. Suatu entitas akuntansi yang bernama “pemerintah daerah”, sudah pasti akan memiliki transaksi yang kompleks dan besar volumenya. Pemanfaatan teknologi informasi mesti akan sangat membantu mempercepat proses pengolahan data transaksi dan penyajian laporan keuangan pemerintah Kota Bitung sehingga laporan keuangan tersebut tidak kehilangan nilai informasi yaitu ketepatan waktu.

### **Pengaruh pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan Pemerintah Kota Bitung**

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa pada variabel pengawasan keuangan daerah,  $t_{hitung} = 3,732 < t_{tabel} = 2,00324$  sehingga variabel ini berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan Pemerintah Kota Bitung. Nilai koefisien regresi kompetensi hanya sebesar 0,180 menunjukkan bahwa dengan adanya pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan untuk nilai informasi laporan keuangan Pemerintah Kota Bitung.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Bitung. Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan dua persamaan regresi linier berganda. Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa :

1. Sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Bitung.
2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Bitung.
3. Pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan Pemerintah Kota Bitung.
4. Sistem Pengendalian intern pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah Kota Bitung.

### **Saran**

Beberapa saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

1. Bagi pihak perangkat daerah (PD) untuk bahan perencanaan strategik harus lebih mempertimbangkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi dan pengawasan keuangan secara bersama-sama dalam menghasilkan nilai informasi yang bisa diandalkan dalam laporan keuangan pemerintah.
2. Pada penelitian selanjutnya sebaiknya waktu yang digunakan untuk mengumpulkan data, proses penelitian diperpanjang agar penelitian memiliki

waktu untuk uji coba dan kolekting data kuesioner.

3. Obyek yang dipilih sebagai sampel diupayakan dan dikembangkan pada responden yang memahami karakteristik operasional instansi.

Memperbesar jumlah sampel dan melengkapi metoda survei dengan wawancara karena saat melakukan penelitian ini peneliti belum sempat melakukan wawancara dengan responden sehingga belum mengetahui adanya jawaban yang berbeda antara kuesioner dengan jawaban secara lisan.

#### DAFTAR PUSTAKA

**Fatchurrohman 2002.** *Persepsi Pengertian Keuangan Daerah dan Pengawasan Keuangan Daerah*

**Ghozali Imam, 2004.** *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*

**Mardiasmo, 2002.** *“Otonomi dan Menjemen Keuangan Daerah”*. Penerbit ANDI, Yogyakarta.

**Mardiasmo, 2005.** *Akuntansi Sektor Publik*, Andi Yogyakarta.

**Sugiyono, 2001.** *Metode Penelitian*, Bandung : CV Alfa Beta

**Sudjana, 2002.** *Metode Statistika*, Bandung

**Suwardjono. 2005.** *Teori Akuntansi: Perencanaan Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta.

**Tuasikal, A. 2007.** *Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah*.

**Wilkinson, Joseph W dan Cerullo, Michael J, 2000.** *Accounting Information System*. New Jersey : Prentice Hall Inc, 2001

**Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.** *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)*

**Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010** *Tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*

**Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005** *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.